

## UNIVERSITAS NEGERI MANADO PENGELOLA PELAKSANA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NOMOR SOP	:
TGL. PEMBUATAN	: 06 November 2023
TGL. REVISI	: 06 Februari 2024
TGL. EFEKTIF	: 18 Maret 2023
DISAHKAN OLEH	PPID Universitas Negeri Manado Profi Dr. Deilje A. Katuuk, M.Pd NIP 1961 D401985032004
NAMA SOP	: PENGUJIAN TENTANG
	KONSEKUENSI

## DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

- 1. PP 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintahan Daerah;
- **3.** Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standart layanan Informasi Publik;
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Manado;
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Negeri Manado;
- 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75037/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Manado Periode Tahun 2020-2024.

- Memiliki pengetahuan tentang peraturan, kebijakan dan profil
  LINIMA
- 2. Memiliki keterampilan menggunakan teknologi informasi
- 3. Memiliki kemampuan kerja di bidang kehumasan
- Memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran, keramahan, dan integritas yang tinggi

KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	Ruang layanan informasi     Komputer, internet, dan printer     ATK
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
	Disimpan sebagai data elektronik dan cetak

		Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan		
No	Kegiatan	Pemohon informasi	Petugas PPID	Tim Pertimbangan pelayanan informsi	Unit penguasa informasi	Keleng- kapan	Waktu	Output	
1.	Melakukan kajian atas informasi/ dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi					Berkas permohonan informasi /dokumen dari pemohon informasi			
2.	Memberikan pertimbangan atas informasi yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU Kepatuhan dan Kepentingan Umum					Perundang- undangan yang dibutuhkan: UU KIP dan PERKI 1/2010			
3.	Menyampaikan ke PPID atas status informasi/dokumen yang diminta pemohon, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi/dokumen yang dimaksud terbuka, maka PPID memerintahkan kepada unit yang menguasai informasi/dokumen untuk menyerahkan informasi/dokumen yang dimaksud jika bersifat rahasi maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon					Informasi/d okumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	14 hari jam kerja		
4.	Memberikan informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon yang menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/dokumen rahasia					Informasi / dokumen yang diminta oleh Pemohon atau surat penolakan kepada pemohon jika status informasi / dokumen rahasia			
5.	Selesai								